

Evaluasi Dampak Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif jenjang SMP di Kota Pekalongan

Oleh :

Yosef Hananto, Dyah Lituhayu

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Sudharto Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7476405

Laman :<http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Inclusion education is an educational service concept that is held for children with special needs with the process of teaching and learning activities in regular schools along with other regular children. The goal is to eliminate discrimination between children with special needs and regular children. In the legislation it is explained that every child who is in the age of study is entitled to get the right to education, including here the child with special needs. The purpose of this research is to see how the learning process that takes place in inclusion school, SMP 10 Kota Pekalongan using 3 main indicators according to Bridgman and Davis are input indicators, process indicators and output indicators.

The method used in this research is descriptive qualitative type method using informants from the manager of inclusive education, staff of Education Office of Pekalongan City; the organizers of inclusive education, SMP 10 Kota Pekalongan; the beneficiary (target group) of the parents of the child with special needs.

The result of the research shows that in the process of teaching and learning activities that take place in inclusion school, SMP 10 Kota Pekalongan, there are problems related to the absence of modification curriculum, GPK with special education base, at least teachers who have followed technical guidance and upgrading, which is limited and limited by the children with special needs received at the inclusive school of SMP 10 Kota Pekalongan, that is only from one kind of disability that is mentally disabled only.

This research will look at the impact of the policy by looking at individual impacts, organizational impacts and impacts on society

Keywords : Policy, Evaluation, Inclusive education

Evaluasi Dampak Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif jenjang SMP di Kota Pekalongan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan inklusif menjadi suatu alternatif pendidikan yang diberikan kepada mereka anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, dan atau bakat istimewa. Pendidikan inklusi merupakan sebuah upaya reformasi dalam bidang pendidikan yang secara simultan, semua gerakan yang telah menarik pelajaran enistomologis dan taktis dari analisis kelemahan pendidikan yang terkait dengan kelas, gender, seksualitas, etnisitas dan cacat. Dengan adanya pendidikan inklusi kiranya dapat memberikan manfaat yaitu, pertama, mengurangi keterpisahan anak antara budaya sekolah dengan budaya masyarakat sekitar. Kedua, mewujudkan kesetaraan dan mengurangi tingkat diskriminasi pada anak terhadap sesama. Ketiga, menjadi solusi atas praktik dari pendidikan segregasi/SLB yang menimbulkan eksklusifitas sosial.

Pada dasarnya, pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) diatur dalam Peraturan Mendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Selain itu sebagai warga

negara indonesia yang menyatakan bahwasannya setiap warga negara indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang dimana hal tersebut diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwasannya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan termasuk bagi mereka yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak untuk memperoleh pendidikan khusus dan UUD RI tahun 1945 menjamin warga negara indonesia untuk mendapatkan hak pendidikannya.

Sistem pendidikan yang diberikan bagi anak berkebutuhan khusus dalam suatu kelas reguler atau yang biasanya disebut sistem pendidikan inklusif di Indonesia sekarang ini sudah mulai dilaksanakan. Keberadaan sekolah-sekolah yang menyediakan basis pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia tidaklah sebanyak sekolah pada umumnya. Sekolah-sekolah bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus ada dengan berlandaskan pada Peraturan Mendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Dalam pasal dua Peraturan Mendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau

Bakat Istimewa, dijelaskan bahwa pendidikan inklusi bertujuan : (1) memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuannya; (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik, dengan hasil yang ingin dicapai yaitu tumbuhnya generasi sumber daya manusia di masa akan datang yang lebih ramah, menghargai keberagaman dan anti terhadap praktik diskriminatif. Selain itu, dalam penyelenggaraannya di Kota Pekalongan sendiri, penyelenggaraan pendidikan inklusi juga disebut didalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2009. Khusus untuk jenjang SMP sendiri, sistem pendidikan inklusif baru terdapat di 1 sekolah menengah di Kota Pekalongan dengan rincian sekolah :

No.	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	No. Telepon
1	SD Negeri Poncol 03 Pekalongan	Jl. Tondano. 1a	0285-434203
2	SD Negeri Bendan 01 Pekalongan	Jl. Lampobotang No 3 Pekalongan	0285-434820

3	SD Negeri Panjang Wetan 03 Pekalongan	Jl. Kusuma Bangsa 10. Panjang Wetan Pekalongan	0285-429531
4	SD Negeri Kuripan Kidul 02 Pekalongan	Jl. HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul – Kota Pekalongan	0285-425630
5	SMP Negeri 10 Pekalongan	Jl. Seruni Timur Klego Pekalongan	0285-7911355

Gambar 1.1 Sekolah Inklusi yang ada di Pekalongan

Sumber : www.bpdiksus.org

Dari data tersebut hanya terdapat satu sekolah jenjang SMP yang menyelenggarakan pendidikan Inklusi. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk jenjang SMP di Kota Pekalongan sendiri baru dimulai pada tahun 2011 berdasarkan SK Dinas Pendidikan Kota Pekalongan No. 420/2983 Tahun 2011 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi jenjang SMP Kota Pekalongan dengan berdasarkan kepada Prosedur Operasi Standar pendidikan inklusif.

B. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menjelaskan evaluasi dampak dari penyelenggaraan

pendidikan inklusif jenjang SMP di Kota Pekalongan

2. Untuk mengidentifikasi kendala apa saja yang dialami dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif jenjang SMP di Kota Pekalongan

C. Teori

1. Administrasi Publik

Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan (dalam Inu Kencana, 2006:24). Sedangkan Arifin Abdurachman (dalam Inu Kencana, 2006:25) mendefinisikan Administrasi Publik adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara. Lain halnya dengan Dwight Waldo yang mengartikan Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah (dalam Inu Kencana, 2006:25).

2. Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (dalam Riant, 2004:3) Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang

membuat sebuah kehidupan bersama tampil

3. Evaluasi Kebijakan Publik

Subarsono (2012:119) memberikan pengertian tentang evaluasi kebijakan sebagai kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan.

4. Evaluasi Dampak Kebijakan

a. Dampak Individual

Dampak terhadap Individu dapat menyentuh aspek-aspek biologis/fisik, psikis, lingkungan hidup, ekonomi dan sosial serta personal.

b. Dampak Organisasional

Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak terhadap organisasi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak. Dampak yang langsung adalah berupa terganggu atau terbantunya organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuannya. Dampak tak langsung terhadap organisasi, isanya melalui peningkatan semangat kerja para anggota organisasi.

c. Dampak terhadap masyarakat

Dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat menunjuk pada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya.

5. Indikator Evaluasi Kebijakan

Menurut Brigman & Davis (Badjuri, 2002:138), pengukuran evaluasi

kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu:

a. Indikator Input

Apakah sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan?

Berapakah sumberdaya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lain yang diperlukan?

b. Indikator Proses

Bagaimanakah sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat?

Bagaimanakah efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut?

c. Indikator Output

Apakah hasil atau produk yang dihasilkan sebuah kebijakan publik?

Berapa orang yang berhasil mengikuti program/kebijakan tersebut?

d. Indikator Outcomes

Apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan?

Berapa banyak dampak positif yang dihasilkan?

Adakah dampak negatifnya? Seberapa seriuskah?

D. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai latar dan interaksi yang kompleks dari partisipan serta fenomena-fenomena menurut pandangan dan definisi partisipan. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status fenomena, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilaksanakan².
Situs Penelitian

2. Situs Penelitian

Situs penelitian menetapkan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Lokus atau wilayah/tempat yang diambil adalah SMP Negeri 10 Kota Pekalongan Jalan Seruni Timur

3. Subjek Penelitian

Penulis memiliki pertimbangan untuk memilih informan mana yang akan dimintai keterangan untuk penelitian di lapangan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala seksi bagian SMP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan
2. Guru yang menangani anak inklusi di SMP Negeri 10 Kota Pekalongan
3. Anak Berkebutuhan Khusus

4. Orang Tua Murid Anak Berkebutuhan Khusus

4. Sumber Data

Penelitian tentang Evaluasi Dampak Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif jenjang SMP di Kota Pekalongan menggunakan jenis data:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data- data yang diperoleh melalui jawaban atas pertanyaan- pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada narasumber dalam wawancara atau pengamatan langsung/observasi.
2. Data Sekunder adalah catatan mengenai kejadian atau peristiwa yang telah terjadi berupa tulisan dari majalah, dokumen, laporan dan sumber- sumber tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Studi Dokumen
Data diperoleh dari renstra dinas, arsip- arsip, peraturan perundang-undangan, dan laporan-laporan dinas yang terkait dengan penelitian ini.
2. Wawancara mendalam
Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam

yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Selain mengacu pada pedoman wawancara, peneliti juga mengembangkan pertanyaan secara spontan, sehingga data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat terkumpul secara maksimal.

3. Observasi

Observasi dalam hal ini adalah melakukan pengamatan secara langsung berkaitan dengan lokasi penelitian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif,

PEMBAHASAN

A. Evaluasi Dampak Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif jenjang SMP di Kota Pekalongan

1. Dampak Individual

a. Dampak Personal

Perubahan Pola belajar yang dialami oleh Anak Berkebutuhan Khusus dengan adanya kurikulum modifikasi walaupun menggunakan kurikulum 2013 yang membedakan dengan SLB. Proses peningkatan semangat belajar dari anak berkebutuhan khusus dilihat dari tingkat kelulusan dari anak berkebutuhan khusus yang ternyata dapat menyelesaikan masa

studinya sama seperti anak reguler pada umumnya

b. Dampak Psikis

Terjadinya perubahan perilaku yang dialami peserta didik anak berkebutuhan khusus seperti contoh dari yang semula tidak bisa berinteraksi sosial dan cenderung menutup diri, sekarang dapat berinteraksi, merawat diri dan mulai bisa mencari informasi

2. Dampak Organisasional

a. Dampak Langsung

Tercapainya tujuan pendidikan untuk memberikan pendidikan kepada setiap warga negara Indonesia yang sedang dalam usia belajar. Terpenuhinya kewajiban dari Dinas Pendidikan sesuai dengan amanat Permendiknas No 70 Tahun 2009 untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi jenjang SMP. Adanya peningkatan kualitas bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yaitu SMP 10 Kota Pekalongan karena ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi.

b. Dampak Tidak Langsung

Peningkatan semangat kerja dan perubahan pola mengajar bagi guru-guru reguler dalam sekolah inklusi

3. Dampak terhadap Masyarakat

Masyarakat sudah mau untuk menerima kehadiran dari anak berkebutuhan khusus sebagai bagian dari masyarakat dan bukan merupakan anak cacat. Adanya perubahan pola pikir dari masyarakat akan anggapan dari anak berkebutuhan khusus dan mau untuk melibatkan anak berkebutuhan khusus dalam setiap kegiatan masyarakat. Selain itu, anak berkebutuhan khusus juga dapat melanjutkan studinya ataupun berjualan yang mana hal tersebut akan berdampak bagi proses penerimaan masyarakat itu sendiri.

B. Kendala yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif jenjang SMP di Kota Pekalongan

1. Input

a. Kurikulum

Kurangnya kurikulum modifikasi bagi anak berkebutuhan khusus dimana anak berkebutuhan khusus memerlukan hal tersebut karena memang tidak semua anak berkebutuhan khusus dapat menerima segala proses pembelajaran reguler seperti anak pada umumnya

b. Pendidik dan tenaga kependidikan

Masih membutuhkan adanya GPK karena GPK yang tersedia masih belum dari basis pendidikan khusus dan masih merupakan guru-guru

wiyata bakti yang dianggap sekolah mampu menangani anak berkebutuhan khusus. Walaupun untuk mendatangkan GPK dengan basis pendidikan khusus dari SLB juga mengalami keterbatasan anggaran. Beban kinerja yang ditambahkan juga dirasa kurang sesuai dengan upah gaji yang diberikan.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana yang tersedia hanya sarana-sarana umum yang sama seperti di sekolah reguler pada umumnya. Tidak ada sarana khusus yang spesifik untuk anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar.

2. Proses

a. Pembinaan dan Pengawasan

Kendala dalam keterbatasan anggaran untuk melakukan proses pembinaan bagi guru-guru reguler di sekolah inklusi. Untuk hal pengawasan, dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan melakukan kunjungan ke sekolah inklusi bersama dengan orang tua siswa.

b. Kerjasama

Proses kerjasama dilakukan dengan SLB dan psikolog. Kerjasama dengan SLB dalam rangka untuk mendatangkan GPK dengan basis

dari pendidikan khusus. Sedangkan proses kerjasama dengan psikolog yaitu untuk melakukan assesment terhadap peserta didik baru untuk melihat jenis ketunaan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus tersebut.

3. Output

a. Peserta Didik

Dalam proses penerimaan peserta didik baru, sekolah hanya menerima peserta didik anak berkebutuhan khusus dari jenis ketunaan tunagrahita saja dan tidak menerima anak berkebutuhan khusus dengan jenis ketunaan yang lainnya dimana hal tersebut tidak sejalan dengan amanat Permendiknas No 70 Tahun 2009 dan prosedur operasi standar pendidikan inklusi di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Evaluasi Dampak kebijakan penyelenggaraan pendidikan Inklusif jenjang SMP di Kota Pekalongan
 - a. Dampak Individual : Terjadinya perubahan pola perilaku dari anak berkebutuhan khusus; anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti proses pembelajaran yang bertujuan agar mereka dapat menjadi mandiri; memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus agar tidak perlu

melanjutkan sekolah di SLB namun bisa di sekolah inklusif; terjadinya pola perubahan dalam proses interaksi yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus.

b. Dampak Organisasional : Tercapainya tujuan dari UU yang juga menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk jenjang SMP; perubahan cara mengajar dari guru-guru yang mengajar anak berkebutuhan khusus; tercapainya visi dan misi pendidikan inklusif yang terdapat di SMP 10 Kota Pekalongan

c. Dampak terhadap Masyarakat : Perubahan pola pikir dari masyarakat bahwasannya anak berkebutuhan khusus bukanlah anak cacat; anak berkebutuhan khusus mulai bisa diterima keberadaannya dalam lingkungan masyarakat; memudahkan masyarakat, khususnya mereka yang memiliki anak berkebutuhan khusus sehingga dapat menyekolahkan anak mereka di sekolah inklusif yang tentu biayanya berbeda jika dibandingkan dengan menyekolahkan anak berkebutuhan khusus ke SLB.

2. Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif jenjang SMP di Kota Pekalongan

a. Aspek input : kurangnya ketersediaan GPK yang berdampak pada

proses kegiatan belajar mengajar bagi anak berkebutuhan khusus yang tidak intens; perlu memperhatikan modifikasi kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus agar anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti; ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang.

b. Aspek proses : kurangnya bimtek bagi guru-guru reguler yang mengajar di sekolah inklusif; diperlukan GPK sendiri dari sekolah karena jika terus mengandalkan dari SLB akan menyulitkan proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus tersebut, karena memang dijelaskan bahwasannya setiap sekolah inklusif wajib memiliki minimal 1 orang GPK.

c. Aspek Output : keterbatasan jenis ketunaan dari peserta didik yang diterima, yaitu hanya tunagrahita saja, sedangkan anak berkebutuhan khusus tidak hanya tunagrahita saja.

B. Saran

1. Dalam aspek pendidik dan tenaga kependidikan, untuk GPK yang memang dalam Permendiknas setiap sekolah diwajibkan memiliki 1 orang GPK, alangkah baiknya jika jumlah GPK dalam suatu sekolah inklusi dapat ditingkatkan lagi, mengingat jika hanya ada 1 orang GPK saja pasti akan sulit untuk dapat menangani anak berkebutuhan khusus dalam suatu

sekolah inklusi. Diperlukan juga adanya GPK yang memiliki basis pendidikan khusus. Sehingga diharapkan untuk kedepannya, sekolah dapat mendatangkan GPK dengan basis pendidikan khusus yang mengerti kebutuhan dari anak berkebutuhan khusus.

2. Untuk sarana dan prasarana karena memang hanya terdapat anak berkebutuhan khusus dengan jenis ketunaan tunagrahita saja, perlu diperhatikan mengenai Permendiknas yang mengatur perihal mengenai peserta didik, dimana sekolah inklusi juga wajib menerima dan menyediakan sarana bagi anak berkebutuhan khusus dengan jenis ketunaan yang lainnya, tidak hanya tunagrahita saja.

3. Proses pembinaan bagi guru-guru reguler yang mengajar di sekolah inklusi dapat lebih diperhatikan kembali, mengingat guru-guru reguler juga membutuhkan pembinaan seperti diklat dan bimtek untuk setidaknya mengetahui kebutuhan dari peserta didik berkebutuhan khusus, karena memang baru beberapa guru saja yang sudah menerima proses pembinaan. Pemerintah seharusnya dapat menaruh perhatian yang lebih bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, karena disekolah tersebut memiliki

peserta didik khusus. Sehingga ketika pemerintah menunjuk suatu sekolah inklusi harus diikuti dengan konsistensi dan komitmen untuk dapat menyelenggarakannya.

4. Sekolah seharusnya dapat menerima anak berkebutuhan khusus dengan jenis ketunaan yang lainnya, karena dalam Permendiknas dijelaskan bahwa sekolah penyelenggara pendidikan inklusi wajib menerima anak berkebutuhan khusus dengan jenis ketunaannya masing-masing tanpa ada diskriminasi.

5. Dampak individual yang dirasakan oleh peserta didik merupakan suatu dampak yang positif dimana mereka dapat mengikuti proses kegiatan belajar mengajar dengan baik dan menyelesaikan studi sesuai dengan masa waktunya. Kontribusi dari masyarakat bagi anak berkebutuhan khusus juga merupakan suatu dampak dimana pada kenyataannya anak berkebutuhan khusus tidak lagi merasa tersingkirkan sehingga sekiranya masyarakat dapat menghilangkan adanya stigma negatif yang sedari dulu mereka berikan bagi anak berkebutuhan khusus bahwasannya mereka bukan anak cacat, namun mereka merupakan anak dengan kemampuan/bakat istimewanya masing-masing. Mereka sama seperti

anak umum lainnya, namun dengan keterbatasannya mereka berusaha mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Dengan adanya hasil dari anak berkebutuhan khusus, dimana diantara dari mereka terdapat anak berkebutuhan khusus yang telah menyelesaikan studinya dan bekerja juga dapat memberikan motivasi bagi pihak pengelola pendidikan inklusif agar lebih memperhatikan kembali perkembangan pendidikan inklusif terutama di Kota Pekalongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Thoha, Miftah. 2011. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Yogyakarta: Medpress.
- Munib, Achmad. 2006. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang: UPT MKK UNNES
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sumber lain:

Balai pengembangan Pendidikan Khusus dalam www.bpdikus.org diakses pada tanggal 14 Desember 2015

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam <http://jip.pdkjateng.go.id/> diakses pada tanggal 14 Desember 2015

Kota pekalongan dalam pekalongankota.go.id diakses pada tanggal 13 Desember 2015

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam dindikpora.pekalongankota.go.id diakses pada tanggal 13 Desember 2015

Dokumen

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2009

Rencana Penggunaan Anggaran Program Pengembangan Sekolah Inklusi (Bantuan APBD II) SMP Negeri 10 Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016